

Upaya Sekolah dalam Mencegah Praktik Korupsi di Dunia Pendidikan

Zainudin Hasan^{1*}, Daniel Junesco²

^{1,2} Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: zainudinhasan@ubl.ac.id^{1*}, danieljunesko@gmail.com²

Abstract, Corruption is a serious issue that hinders development and disrupts the social order in Indonesia. Efforts to prevent corruption rely not only on law enforcement but also on character building and the instillation of integrity from an early age. Education in schools plays a crucial role in shaping young generations with integrity and an awareness of anti-corruption values. Through a curriculum that emphasizes moral values, ethics, and social responsibility, schools can serve as the foundation for creating a society free from corruption. Anti-corruption education must become an integral part of the national education system. As a recommendation, the government and relevant stakeholders should strengthen the implementation of anti-corruption education in schools by providing teacher training and developing age-appropriate materials for students. The suggestion needed is to provide training to security guards and canteen guards, so that students get better anti-corruption education.

Keywords: anti-corruption; security guard; canteen seller; education; young generation

Abstrak, Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial di Indonesia. Upaya pencegahan tindak korupsi tentu tidak dapat bergantung pada penegakan hukum saja, tetapi juga terdapat pada pembentukan karakter serta nilai-nilai integritas sejak dini. Pendidikan di sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan memiliki kesadaran akan bahayanya korupsi. Melalui kurikulum yang menanamkan nilai moral, etika, serta tanggung jawab sosial, sekolah dapat menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih bersih dari korupsi. Pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Sebagai saran, pemerintah dan pihak terkait perlu memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah dengan dukungan pelatihan bagi guru serta pengembangan materi yang sesuai dengan usia dan kebutuhan siswa. Saran yang diperlukan adalah dengan memberi latihan kepada satpam dan penjaga kantin, supaya siswa mendapat edukasi antikorupsi lebih baik

Kata Kunci: antikorupsi; satpam; penjual kantin; Pendidikan; generasi muda

1. LATAR BELAKANG

Korupsi adalah salah satu masalah utama yang selalu dihadapi oleh berbagai sektor yang ada di Indonesia, termasuk sektor pendidikan. Dalam dunia pendidikan, korupsi menjadi ancaman serius terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pendidikan yang dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Berbagai bentuk korupsi, seperti penyalahgunaan anggaran pendidikan, pungutan liar, manipulasi nilai, dan penggunaan dana sekolah yang tidak transparan, sering kali terjadi di lingkungan pendidikan. Generasi muda seringkali memiliki pemahaman yang minim terhadap makna dan relevansi nilai-nilai Pancasila, sehingga mengurangi kesadaran akan pentingnya nilai-nilai tersebut sebagai sarana mengikat bangsa.

Praktik korupsi di dunia pendidikan tidak hanya terjadi di tingkat birokrasi yang tinggi, tetapi juga merambah ke unit-unit pendidikan di tingkat lokal, seperti sekolah-sekolah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa korupsi dapat terjadi di mana saja dan kapanpun, bahkan di sebuah lembaga yang seharusnya menjadi tempat pendidikan karakter dan moral bagi

generasi muda. Jika tidak segera diatasi, korupsi dalam pendidikan akan semakin meluas dan mengikis kualitas pendidikan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Hal ini akan sangat berdampak buruk pada kemampuan negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas di masa depan, serta berusaha untuk menyelenggara sistem pendidikan nasional yang mampu mengubah kualitas masyarakat Indonesia untuk dapat memiliki moral dan sikap dalam memajukan mutu pendidikan.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, masyarakat sekolah memiliki peran yang sangat strategis. Masyarakat sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, siswa, orang tua, serta komunitas pendidikan di sekitarnya, harus menjadi motor penggerak dalam upaya pencegahan korupsi di dunia pendidikan. Keterlibatan aktif semua pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan kunci keberhasilan dalam mencegah praktik-praktik koruptif. Sinergi antara pihak sekolah dan masyarakat luas juga diperlukan untuk memperkuat pengawasan serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran di sekolah dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab.

Upaya pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan dapat dilakukan dengan melalui beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang sangat penting adalah pendidikan antikorupsi yang sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah. Pendidikan anti korupsi yang diberikan di usia dini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab pada anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang anti korupsi. Pendidikan karakter ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak buruk korupsi, tetapi juga untuk membentuk perilaku siswa agar selalu menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memegang peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ini, mengingat siswa menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah dan terlibat langsung dalam proses pendidikan.

Selain pendidikan karakter, transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah juga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah korupsi. Salah satu sumber korupsi di lingkungan pendidikan adalah penyalahgunaan dana sekolah, baik itu dana operasional maupun dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan dana sekolah harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk komite sekolah dan orang tua siswa. Dengan adanya transparansi, semua pihak dapat mengetahui bagaimana dana sekolah digunakan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Pengawasan yang ketat dari pihak terkait, seperti inspektorat

pendidikan dan lembaga pengawas independen, juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.

Tidak hanya itu, kenaikan nilai korupsi melibatkan semua pihak mulai dari sebuah lembaga pendidikan, orang tua, negara, dan lembaga-lembaga lain untuk segera memandang pentingnya sebuah pengembangan pendidikan antikorupsi. Inilah pentingnya partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi juga harus ditekankan. Orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pendidikan, termasuk bagaimana sekolah dikelola. Partisipasi aktif orang tua dalam rapat-rapat komite sekolah dan keterlibatan dalam kegiatan pengawasan dapat membantu memastikan bahwa sekolah telah berjalan dengan baik dan telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Pendidikan anti korupsi di sekolah merupakan langkah yang sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat sekitar juga dapat berperan sebagai agen pengawasan eksternal yang mengawasi jalannya pendidikan di sekolah-sekolah setempat. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi.

Lebih lanjut, penerapan teknologi dalam pengelolaan sekolah juga dapat menjadi solusi efektif dalam upaya pencegahan korupsi. Penggunaan sistem informasi manajemen sekolah yang terkomputerisasi memungkinkan pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah menjadi lebih transparan dan efisien. Dengan adanya teknologi, pencatatan dan pelaporan penggunaan dana dapat dilakukan secara lebih mudah dan akurat, serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk orang tua dan lembaga pengawas. Teknologi juga memungkinkan adanya audit yang lebih cepat dan tepat, sehingga praktik korupsi dapat dideteksi sejak dini.

Sebagai kesimpulan, upaya masyarakat sekolah dalam mencegah praktik korupsi di dunia pendidikan merupakan langkah yang sangat krusial untuk memastikan pendidikan yang bersih dan berkualitas. Pendidikan antikorupsi, transparansi dalam pengelolaan dana, partisipasi aktif orang tua dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi merupakan beberapa strategi utama yang dapat diimplementasikan. Semua pihak harus bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi, karena hanya dengan demikian sistem pendidikan dapat berfungsi optimal dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan berintegritas tinggi.

Peran mereka juga dapat dilihat dalam konteks pengawasan dan pengendalian sosial. Kehadiran mereka yang dekat dengan siswa memungkinkan mereka untuk lebih peka terhadap tanda-tanda perilaku yang mengarah pada korupsi atau pelanggaran etika. Dengan melaporkan atau memberikan teguran kepada siswa yang terlibat dalam perilaku mencurigakan, satpam dan penjual kantin turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari

praktik korupsi. Dalam konteks ini, peran aktif dan kolaboratif dari seluruh masyarakat sekolah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pendidikan anti korupsi yang telah diberikan di usia dini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab pada para siswa, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang anti korupsi.

2. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, penaga non-pendidik seperti satpam dan penjual kantin sering kali tidak terlibat langsung dalam program pendidikan antikorupsi di sekolah. Permasalahan dalam mencegah praktik korupsi di sekolah, terutama dari sudut pandang satpam dan penjaga kantin, sering kali berakar dari perilaku siswa yang mencoba mencari keuntungan pribadi melalui tindakan tidak jujur. Satpam dapat melihat siswa yang berusaha menghindari aturan, sementara penjaga kantin mungkin menyaksikan siswa yang memanipulasi pembayaran. Perilaku semacam ini, jika tidak ditangani dengan baik, bisa berkembang menjadi sikap yang lebih serius di masa depan. Kurangnya penekanan pada pendidikan karakter dan keteladanan dalam lingkungan sekolah juga memperburuk situasi ini. Jika pelanggaran kecil dianggap remeh, siswa mungkin menganggap tindakan tidak jujur adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, upaya sekolah dalam mencegah praktik korupsi di masa mendatang harus mencakup penguatan pendidikan etika, penerapan aturan yang tegas, dan melibatkan seluruh elemen sekolah, termasuk satpam dan penjaga kantin, untuk memastikan setiap siswa belajar pentingnya kejujuran dan integritas sejak dini.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif untuk dapat memahami secara mendalam kontribusi satpam sekolah dan penjual kantin dalam membangun karakter antikorupsi pada generasi muda di lingkungan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktik yang dilakukan oleh narasumber dalam interaksi mereka dengan siswa, dengan wawancara semi-terstruktur sebagai metode utama pengumpulan data. Satpam sekolah dipilih karena perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta akses langsung terhadap perilaku siswa di luar kelas, sementara penjual kantin dipilih karena interaksi rutin dengan siswa dalam konteks transaksi dan perilaku sehari-hari. Melalui wawancara, penelitian ini berupaya menggali bagaimana kedua pihak berperan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi, seperti kejujuran dalam bertransaksi dan kedisiplinan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-

pola penting terkait kontribusi mereka dalam pendidikan antikorupsi di sekolah. Selain wawancara, penelitian ini juga melibatkan observasi partisipatif untuk mengamati interaksi antara satpam, penjual kantin, dan siswa dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan beberapa temuan penting terkait kontribusi satpam dan penjual kantin dalam membangun karakter antikorupsi pada siswa di lingkungan sekolah. Hasil wawancara dengan satpam dan penjual kantin menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki interaksi yang cukup intens dengan siswa, implementasi pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah masih belum optimal. Berikut adalah beberapa poin utama dari hasil penelitian:

Satpam sebagai Figur Disiplin: Satpam memiliki peran penting dalam menegakkan aturan dan kedisiplinan di sekolah. Namun, kebanyakan satpam mengakui bahwa mereka belum dilibatkan dalam program pendidikan antikorupsi secara formal. Satpam cenderung hanya fokus pada tugas utama mereka terkait keamanan dan ketertiban sekolah, sehingga nilai-nilai antikorupsi belum menjadi bagian dari peran mereka.

Penjual Kantin dalam Praktik Jujur Bertransaksi: Penjual kantin, yang berhubungan langsung dengan siswa dalam konteks transaksi keuangan, menunjukkan adanya potensi untuk menanamkan nilai kejujuran. Namun, praktik sehari-hari di kantin sering kali tidak mempromosikan transparansi dalam transaksi. Beberapa penjual kantin menyadari pentingnya kejujuran, namun kurangnya edukasi antikorupsi membuat mereka tidak sepenuhnya memahami bagaimana peran mereka bisa mendukung pendidikan karakter antikorupsi.

Kurangnya Integrasi Pendidikan Antikorupsi: Pendidikan antikorupsi, meskipun sudah dimasukkan dalam kurikulum, masih belum terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Interaksi antara siswa dengan satpam dan penjual kantin belum diarahkan untuk menjadi bagian dari penanaman nilai-nilai integritas. Selain itu, guru sebagai tenaga pendidik juga belum sepenuhnya berkolaborasi dengan tenaga non-pendidik dalam upaya pendidikan antikorupsi ini.

Kesadaran dan Pemahaman yang Rendah: Kesadaran dan pemahaman satpam dan penjual kantin tentang pentingnya pendidikan antikorupsi masih rendah. Mereka belum dilibatkan dalam pelatihan atau program khusus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pendidikan antikorupsi dan peran mereka dalam membentuk

karakter siswa. Kesadaran anti korupsi perlu ditanamkan kepada non-pendidik sebagai bentuk pencegahan dari tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Penelitian ini menegaskan bahwa peran satpam dan penjual kantin dalam pendidikan antikorupsi sangat penting, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Pendidikan antikorupsi bukan hanya tanggung jawab guru, melainkan seluruh elemen di sekolah, termasuk tenaga non-pendidik seperti satpam dan penjual kantin. Melalui interaksi sehari-hari yang lebih intensif dengan siswa, mereka sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Namun, karena belum ada kerjasama yang sistematis antara tenaga pendidik dan non-pendidik dalam mendukung program ini, proses pembentukan karakter siswa yang antikorupsi belum berjalan efektif. Keterlibatan mereka seharusnya tidak hanya terbatas pada fungsi keamanan dan penyediaan makanan, tetapi juga sebagai bagian dari edukasi karakter siswa. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan khusus bagi satpam dan penjual kantin sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan optimal.

Pendekatan holistik dengan melibatkan semua pihak di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga tenaga non-pendidik, sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas korupsi. Pendidikan karakter antikorupsi tidak boleh hanya menjadi bagian dari mata pelajaran, tetapi juga harus tercermin dalam interaksi sosial dan lingkungan sekolah sehari-hari. Dengan Melibatkan siswa dalam berbagai aktifitas sosial disekolah dan di lingkungannya. Ini ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dalam rangka melatih mereka untuk berbagi tanggung jawab sosial.

5. KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi memegang peranan yang sangat penting dalam membangun karakter anak bangsa, terutama dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus dimulai sejak dini. Pembentukan karakter antikorupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidik, tetapi juga melibatkan seluruh pihak di lingkungan sekolah, termasuk tenaga non-pendidik seperti satpam dan penjual kantin. Meskipun keduanya berinteraksi langsung dengan siswa, peran mereka dalam pendidikan antikorupsi belum dimanfaatkan secara optimal. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat melalui mata pembelajaran PKN. Mata pelajaran PKN dapat ditanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan materi-materi hukum dan bahaya korupsi bagi pribadinya dan juga bangsa dan negara.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kesadaran dan pemahaman mengenai pendidikan antikorupsi di kalangan satpam dan penjual kantin masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pelatihan khusus untuk mereka, agar mereka dapat mendukung pendidikan karakter yang antikorupsi dengan lebih maksimal.

Salah satu temuan penting lainnya adalah kurangnya integrasi pendidikan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendidikan antikorupsi sering kali hanya terfokus pada materi pelajaran formal, tanpa adanya penerapan langsung dalam interaksi sosial sehari-hari di lingkungan sekolah. Padahal, nilai-nilai yang ingin ditanamkan melalui pendidikan antikorupsi, seperti kejujuran dan tanggung jawab, harus diinternalisasi secara konsisten dalam segala aspek kehidupan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Oleh karena itu, perlu ada sinergi yang lebih baik antara tenaga pendidik dan non-pendidik untuk menciptakan suasana sekolah yang bersih dari praktik korupsi.

Membangun budaya antikorupsi di sekolah memerlukan kerjasama yang erat antara semua pihak terkait, termasuk kepala sekolah, guru, satpam, penjual kantin, orang tua, dan masyarakat. Dalam hal ini, kolaborasi yang lebih terstruktur dan terarah sangat dibutuhkan agar pendidikan antikorupsi dapat diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem manajemen keuangan berbasis digital, yang dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sekolah. Melalui penerapan teknologi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan sekolah yang lebih terbuka dan bebas dari penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak integritas pendidikan.

Secara keseluruhan, pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Ini tidak hanya akan membentuk karakter siswa yang berintegritas, tetapi juga dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih bersih dan bebas dari korupsi. Upaya pendidikan antikorupsi di sekolah memerlukan kerja sama dan komitmen dari seluruh elemen pendidikan, dengan melibatkan semua pihak, termasuk tenaga non-pendidik, untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik.

6. SARAN

Dalam upaya mengatasi masalah korupsi yang sudah menjadi satu di Indonesia, langkah pertama yang perlu diambil oleh pihak sekolah adalah memperkuat implementasi pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah. Hal ini dapat dimulai dengan peningkatan pelatihan bagi satpam dan penjual kantin. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya nilai integritas dan kejujuran, serta bagaimana mereka dapat

berkontribusi dalam mendukung pembentukan karakter siswa. Satpam, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, dan penjual kantin, yang berinteraksi langsung dengan siswa dalam konteks transaksi keuangan, dapat menjadi agen perubahan yang sangat efektif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari korupsi.

Pendidikan antikorupsi tidak hanya harus diajarkan dalam bentuk materi pelajaran yang bersifat teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Misalnya, transaksi yang transparan di kantin dan penerapan disiplin yang adil oleh satpam dapat mencerminkan nilai-nilai antikorupsi yang diharapkan. Dengan cara ini, nilai kejujuran dan tanggung jawab dapat diterapkan secara lebih alami dalam kehidupan sehari-hari siswa, menjadikannya bagian dari budaya sekolah yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan sekolah, tidak hanya terbatas pada ruang kelas, agar siswa dapat merasakan dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam situasi yang nyata.

Selain itu, penting untuk mengembangkan kolaborasi yang lebih kuat antara tenaga pendidik dan non-pendidik dalam mendukung pendidikan antikorupsi. Kerjasama antara guru, satpam, dan penjual kantin sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan karakter yang antikorupsi. Mereka perlu bekerja sama untuk menyamakan pemahaman dan komitmen terhadap pendidikan antikorupsi, sehingga mereka dapat memberikan contoh yang konsisten dalam menerapkan prinsip integritas. Kerja sama ini akan memaksimalkan dampak pendidikan antikorupsi, mengingat bahwa pengaruh non-pendidik terhadap siswa sangat signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku mereka.

Partisipasi aktif orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan dan pemberdayaan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah. Orang tua, adalah guru pertama yang mendidik anak-anak, dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa nilai-nilai antikorupsi diterapkan di rumah dan mendukung sekolah dalam upaya tersebut. Masyarakat sekitar juga dapat berperan sebagai agen pengawasan eksternal yang membantu memastikan bahwa sekolah mengelola sumber daya dan anggaran dengan transparansi. Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi.

Terakhir, pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan administrasi sekolah sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana sekolah. Sistem manajemen keuangan berbasis teknologi akan memudahkan pengawasan dan memastikan penggunaan dana sekolah yang tepat sasaran. Selain itu, pengembangan kurikulum yang memasukkan pendidikan antikorupsi secara menyeluruh dan sesuai dengan usia siswa

akan membantu membangun kesadaran dan sikap antikorupsi sejak dini. Dengan cara ini, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh dengan karakter yang kuat, memiliki integritas yang tinggi, dan memiliki komitmen untuk melawan korupsi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajri, M. R., Aulia, P., Puspita, S. B., Widiyatma, D., Rohali, R. D. A., & Supriyono, A. S. (2024). Edukasi Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Generasi Anti Korupsi. *Panggung Kebaikan: Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(4), 32-42.
- Hasan, Z., Labibah, A. D., Kelana, N. M., & Putri, C. K. (2024). Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai Sarana Mengikat Bangsa pada Zaman Generasi Milenial. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 292-299.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241-255.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27), 227-239.
- Montessori, M. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11(1).
- Nestariana, N. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 28-31.
- Shaliadi, I., & Dannur, M. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 1(1 Juli), 15-22.
- Suhendra, N., Hatmawan, A. A., Shifa, M., & Yuliana, D. (2023). PEMBEKALAN BUDAYA ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN EKONOMI BANGSA DI LINGKUNGAN SMA/MA/SMK TAPAKTUAN. *Indonesian Journal Of Community Service*, 3(2), 90-98.
- Widyaningrum, H., Rohman, A. N., Sugeng, S., & Putri, E. A. (2020). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 3(1), 27-32.